

UPAYA HUKUM GUGATAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

Gusti Maulana Abimanyu¹, Endik Wahyudi²

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

e-mail: mgusti491@gmail.com

Abstract

In Indonesia, several cases of victims of wrongful arrests often occur, due to errors or negligence of the investigation and investigation process that are not in accordance with existing procedures or laws. This resulted in the victim's wrongful arrest suffering both physically, psychologically and materially and received a negative stigma from the community. In this study the authors used a qualitative normative research method. In this study, two problems have been formulated, namely how the judges consider the number 131 PK / PID.SUS / 2015 and how legal remedies for victims of wrongful arrests are carried out by law enforcement officials. in Chapter I will discuss the background, Chapter II will discuss an overview of compensation for victims of wrongful arrest, Chapter III will discuss compensation and rehabilitation through the process of filing a lawsuit to court, Chapter IV will discuss and analyze cases from this research, while in Chapter V is the result of research which concludes that defendants who have been terminated are given the right to demand compensation and rehabilitation of course in a fast and easy way and then socialize these rules to defendants who have been released in particular and the public in general so that they understand their rights better. The amount of compensation from compensation must also be adjusted to the times so that it can provide more benefits for the accused who has been released in particular and the general public. In this case the legal protection for a defendant who was acquitted in the Criminal Procedure Code and its practice was re-tested. Criminal Procedure Code and its implementation in terms of legal protection do not meet the times regarding the nominal amount of compensation and rehabilitation, namely restoration of good name. For this reason, the revision of the Criminal Procedure Code and its implementation that is more than 30 years old is considered mandatory and contains a high level of urgency.

Keyword: Compensation, Victim of Wrong Arrest, Rehabilitation

Abstrak

Di Indonesia sering terjadi kasus korban salah tangkap, hal ini terjadi akibat kelalaian dari proses penyelidikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif bersifat kualitatif. Pada penelitian ini telah dirumuskan dengan dua permasalahan yaitu bagaimana dengan pertimbangan hakim pada Nomor 131 PK/PID.SUS/2015 dan bagaimana upaya hukum bagi korban salah tangkap yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. pada Bab I akan membahas latar belakang, Bab II akan membahas tinjauan umum tentang ganti rugi korban salah tangkap, Bab III akan membahas ganti kerugian dan rehabilitasi melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan, Bab IV akan membahas dan menganalisa kasus dari penelitian ini, sedangkan pada Bab V adalah hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kepada terdakwa yang telah diputus Setiap korban akan dibeikan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi yang menuntut. Dengan demikian maka akan diberikan cara yang aman, cepat dan mudah. Dengan hal tersebut maka setiap terdakwa juga akan diberikan sosialisasi mengenai aturan bagaimana tata cara untuk menuntut dan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat apa saja hak yang dieperoleh oleh seorang terdakwa. Dan mengenai imbalan juga akan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada dan di harapkan memberikan manfaat yang banyak bagi para terdakwa yang telah di putus lepas dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum. Dalam kasus ini perlindungan hukum bagi terdakwa yang diputus bebas dalam KUHAP dan pelaksanaannya kembali diuji prakteknya. KUHAP dan pelaksanaannya dalam hal perlindungan hukum tidak memenuhi perkembangan zaman mengenai nominal jumlah ganti kerugian dan rehabilitasi yaitu pemulihan nama baik. Untuk itu revisi terhadap KUHAP dan pelaksanaannya yang telah berumur lebih dari 30 tahun dinilai wajib dan mengandung tingkat urgensi yang tinggi.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Korban Salah Tangkap, Rehabilitasi